

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis ingin mengambil judul tersebut sebab ingin meneliti atau mengetahui sejauh mana keterlibatan AS di PBB dalam kasus Agresi Israel ke Lebanon. Disamping itu, penulis berasumsi bahwa judul tersebut menarik. Dan juga penulis ingin mengetahui motivasi AS dalam ikut campur mengurus politik Israel hingga menginvasi Lebanon dan mengindahkan PBB sehingga timbul pertanyaan besar mengapa Amerika Serikat selalu menjadi salah satu aktor utama dalam kaneah politik internasional.

PBB sebagai sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk menciptakan perdamaian dunia dengan organ pokok di dalamnya yaitu Dewan Keamanan PBB ternyata belum bisa menjadi sebuah media yang efektif dalam pencegahan konflik-konflik internasional juga merupakan suatu alasan bagi penulis.

Semoga judul tersebut bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Dengan harapan judul tersebut bisa menambah dan menjadikan suatu bahan kajian bagi pengembangan khususnya Ilmu Hubungan Internasional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan skripsi ini pada dasarnya ada dua yaitu :

Pertama tujuan umum yaitu dalam penulisan penelitian atau skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu hubungan internasional UMY untuk menyelesaikan atau mencapai gelar sarjana atau strata 1 dan menerapkan teori-teori yang selama ini di pelajari dari bangku kuliah.

Kedua tujuan khusus yaitu, penulis ingin menjelaskan sejauh mana intervensi AS di PBB sehingga Israel mengagresi Libanon. Dan penulis ingin memberikan penjelasan tentang pengaruh hegemoni AS di PBB dalam kasus agresi Israel ke Libanon.

## **C. Latar Belakang Masalah :**

Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel melakukan agresinya ke Jalur Gaza, Palestina dan Libanon. Agresi militer Israel ke kedua wilayah itu dipicu oleh hal yang sama yaitu tertawannya serdadu-serdadu Israel oleh para pejuang Palestina dan Hizbullah. Dari sisi politik, serbuan atau agresi Israel ke Libanon disejajarkan dengan serbuan AS ke Irak, yang ditandai dengan lemahnya dukungan sekutu AS. Dari sisi militer, agresi Israel ini juga ditandai oleh munculnya perlawanan kuat dari Hezbollah. Hal ini sempat memunculkan kesimpulan sementara bahwa militer Israel yang selama ini dianggap amat superior dibandingkan dengan militer negara-negara Arab di sekelilingnya telah menyusut keampuhannya.

Nyaris tidak masuk akal bahwa serangan membabi buta Israel terhadap sasaran-sasaran sipil dan Infrastruktur Lebanon hanya bertujuan membebaskan dua serdadu Israel yang disandera Hezbollah. Padahal, untuk membebaskan serdadu yang ditangkap itu sangat mudah. Hezbollah akan melepaskan mereka kalau Israel bersedia melepaskan ratusan anggota Hezbollah yang ada dipenjara Israel.

Konflik Arab Israel kian meluas. Setelah menggempur Palestina di Jalur Gaza sejak akhir Juni 2006, kini Israel terlibat dalam perang terbuka dengan kelompok Hezbollah di Lebanon. Tidak hanya itu, kini terbuka kemungkinan Israel menyerang Suriah yang dituduh terlibat dalam penyanderaan seorang tentara Israel di Jalur Gaza oleh pejuang Palestina maupun dua tentara Israel oleh Hezbollah di selatan Lebanon. Tudingan ini belum tentu benar meski Suriah punya pengaruh terhadap pejuang Palestina semacam Hamas maupun Hezbollah.

Meski kecil kemungkinannya, Israel mengancam akan menyeret keterlibatan semua Negara Arab. Iran, negara Timur Tengah Non-Arab sekutu Suriah dan pendukung utama Hezbollah, bahkan menyatakan akan membantu Suriah apabila negara itu diserang. Kendati hanya satu tentara Israel yang disandera di Palestina dan dua di Lebanon, pemerintah Israel melancarkan serangan besar – besaran terhadap dua wilayah itu. Di Jalur Gaza, selain membunuh pejuang Palestina yang berakses pada tewasnya puluhan orang tak berdosa, tentara Israel menghancurkan Infrastruktur Palestina seperti mengebom satu – satunya pembangkit listrik di Jalur Gaza

menghancurkan pipa air, jambatan-jambatan strategis, dan menutup akses Palestina dengan dunia luar. Akibatnya, aktivitas ekonomi Palestina lumpuh, pabrik – pabrik tidak bisa beroperasi, arus masuk keluar barang ke Palestina terhenti. Hal ini menimbulkan penderitaan luar biasa bagi Palestina sehingga PBB mengingatkan akan terjadi krisis kemanusiaan mengerikan di Jalur Gaza.

Kebijakan Israel dimaksudkan untuk memaksa pejuang Palestina melepaskan tentara Israel, Kopral Gilad Shalit, yang disandera. Kecil kemungkinan pejuang Palestina memenuhi permintaan Israel sebagai syarat dihentikannya serangan Israel ke Jalur Gaza kecuali Israel memenuhi permintaan pembebasan 1.500 dari sekitar 10.000 orang Palestina yang ada di penjara Israel. Operasi militer Israel yang brutal di Jalur Gaza akan berlangsung apalagi operasi ini mendapat dukungan AS. Sikap AS ini menyulitkan PBB untuk meredakan konflik yang terus bereskalasi.

Tindakan Israel ini tak lepas dari perhitungan politik PM Israel Ehud Olmert. Olmert pemimpin Israel dari partai Kadima (partai kanan tengah) yang di bentuk PM Ariel Sharon tahun lalu adalah pemimpin yang tidak punya kharisma. Maka ia perlu menanamkan citra diri sebagai pemimpin Israel yang kuat, yang mampu menjamin keamanan rakyat Israel, sebagaimana upaya yang dilakukan hampir semua pemimpin Israel.

Keamanan adalah segala-galanya bagi rakyat Yahudi. Menurut permintaan pejuang Palestina dan Hezbollah agar Israel menukar tentaranya dengan ribuan tahanan Palestina dan Hezbollah akan menjadi presiden buruk dan akan melemahkan pemerintahan Olmert. Hezbollah juga menuntut Israel

membebaskan ribuan anggota Hezbollah yang ditahan Israel untuk ditukar dua tentara yang disanderanya.

Apa pun alasannya, DK PBB harus bertindak menghentikan aksi militer Israel maupun Arab (Palestina dan Hezbollah). Membiarkan aksi kekerasan akan menggoyangkan stabilitas Timur Tengah, bahkan dapat menimbulkan perang besar apabila Israel menyerang Suriah. Sudah puluhan tahun Israel maupun Arab menggunakan kekerasan untuk mencapai sasaran politiknya. Namun, kebijakan ini tidak pernah berhasil. Cara damai melalui jalur diplomatik terbukti lebih efektif seperti terjadi antara Mesir dan Israel (1978), Jordania – Israel (1994), dan sampai tingkat tertentu Fatah – Israel (1993 – 1996). Sasaran politik jangka pendek harus diganti pemikiran jauh kedepan untuk menciptakan perdamaian yang langgeng.

Serangan besar Israel ke Palestina dan Lebanon untuk membebaskan tentaranya yang disandera oleh pejuang Palestina dan Lebanon (Hizbullah) telah menimbulkan kecaman dari berbagai penjuru dunia, khususnya dari umat Islam. Tapi serangan yang dianggap 'legal' oleh Israel tersebut mendapat restu dari Amerika Serikat (AS). AS menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk menggagalkan draf resolusi DK untuk menyelesaikan konflik Israel dan Lebanon.

Seluruh dunia tahu bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat (AS), Israel tidak akan berani menyerang Palestina dan Lebanon secara besar-besaran seperti sekarang ini. Korban sipil dan anak-anak tak berdosa yang jatuh akibat kebrutalan Israel sudah sangat banyak. Dalam masalah Palestina

sudah terbukti bahwa secara politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak dapat berbuat apa-apa, karena semua keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB yang merugikan kepentingan Israel akan segera diveto oleh AS.

Setelah Uni Soviet runtuh, praktis PBB hanyalah menjadi instrumen AS untuk menjadi legitimasi tindakan-tindakannya memperluas dan mempertahankan hegemoninya di dunia. Jika PBB sekali-kali menolak AS untuk memberinya mandat seperti yang terjadi menjelang Invasi ke Irak, AS tidak segan untuk bertindak unilateral.

Karena itu, untuk sekarang ini peran PBB tidak bisa diharapkan lagi untuk bisa menghentikan pertumpahan darah di Palestina maupun Lebanon. Paling-paling, peran PBB hanyalah menjadi koordinator bantuan kemanusiaan. Kasarnya, mereka hanya menjadi tukang sampah yang dipanggil setelah Israel berpesta dengan membantai rakyat Palestina dan Lebanon..

Keadaan yang sulit diubah ini membuat umat Islam menjadi frustrasi dan pada gilirannya memberi angin segar kepada eksponen-eksponen ekstrem dalam tubuhnya untuk berkembang. Jika perkembangannya mencapai tahap terorisme, maka ini adalah perkembangan yang buruk, karena akan membuat umat Islam menjadi semakin tertekan dan menjadi warga dunia kelas dua..

Tindakan Israel menyerang Palestina dan Lebanon dengan dalih membebaskan tentara mereka sangat tidak rasional. Pertama, Israel lebih memilih jalan pintas menggunakan kekuatan militer dibandingkan kekuatan diplomasinya untuk membebaskan tentaranya. Kedua, Israel terlalu arogan

.....

menggunakan restu AS untuk menggempur Palestina dan Lebanon. Keempat, Israel berani mengklaim bahwa gempurannya terhadap Palestina dan Lebanon tidak melanggar hukum internasional.

Dalam forum pembahasan konflik Timur Tengah, khususnya Israel dan Palestina, AS selalu menggunakan hak vetonya untuk membela Israel. AS juga sering merestui tindakan-tindakan Israel untuk menzalimi Palestina. Kini AS juga merestui tindakan Israel untuk menggempur Palestina dan Lebanon sekaligus, dukungan besar yang diberikan AS kepada Israel atas agresinya ke Lebanon, memberikan pertanyaan yang besar tentang politik luar negeri AS selama ini. Seharusnya sudah menjadi tanggung jawab utama AS selaku DK-PBB selaku otoritas internasional untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai prinsip-prinsip Piagam PBB.

#### **D. Pokok Permasalahan :**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut :

**"Bagaimanakah pengaruh hegemoni AS di PBB dalam kasus agresi Israel ke Lebanon ?"**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran :**

Untuk menganalisa permasalahan tersebut diatas, maka di perlukan suatu teori. Teori merupakan pedoman yang dapat mengarahkan suatu penelitian yang empiris yang sangat penting untuk menjelaskan permasalahan

yang ada, sebagai alat analisa dan prediksi. Ada pun kerangka teori yang digunakan adalah :

### **1. Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri (Decision Making Of Foreign Policy Theory)**

#### **Model Pembuatan Keputusan Dalam Politik Luar Negeri**

Hans Morgenthau menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan kepada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional ini diartikan sebagai kelangsungan hidup (survive) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kulturalnya.

Tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang merupakan realisasi dari politik luar negeri sebenarnya merupakan hasil dari cara pembuatan keputusan mendefinisikan situasi yang mencakup keadaan eksternal dan internal yang dianggap relevan oleh pembuatan keputusan dengan masalah politik luar negeri tertentu.

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan nasional yang saling bertentangan. Ini bukan suatu ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil persaingan politik internal yang berlangsung terus-menerus. Pemerintah, melalui lembaga-lembaganya yang pada akhirnya paling bertanggung jawab

dalam mendefinisikan dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan nasional.

Graham T. Allison mengajukan tiga model untuk mendeskripsikan proses pembuatan keputusan luar negeri.

### **Model Aktor Rasional**

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai proses intelektual<sup>1</sup>. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh, individu ini berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada dengan menggunakan kriteria "optimalisasi hasil". Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasional yang dikandungnya. Para pembuat keputusan dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Karena itulah model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri.

---

Kebijaksanaan yang diambil/politik luar negeri yang dilaksanakan merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan-tujuan strategis dari bangsa tersebut yang pasti menguntungkan tujuan/kepentingan nasionalnya.

Politik Luar Negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya dan itu di terapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijakan politik luar negeri suatu bangsa. Teori merupakan bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahu mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi, maka selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi.<sup>2</sup>

Bagaimanapun luasnya penelaahan terhadap peranan politik luar negeri USA tingkah laku politik luar negeri AS di PBB terhadap agresi Israel di Libanon tetap pada batasan bahwa politik luar negeri merupakan suatu tindakan yang terencana dan sudah diperhitungkan minimal dan maksimalnya tentang untung rugi serta baik buruknya. Suatu mekanisme bagi suatu politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya.

Politik luar negeri menurut Jack C. Plano dan Roy Olton sebagai berikut :

*Foreign policy is a strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals define in terms of national interest.*<sup>3</sup>

Jadi politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Jadi politik luar negeri dapat di gunakan atau terjadi apabila interaksi yang dilakukan dalam bentuk hubungan masyarakat Internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Politik Luar Negeri Amerika Serikat sama seperti politik luar negeri pada umumnya selalu bervariasi dan seringkali berubah-ubah. Perubahan itu diakibatkan oleh adanya benturan baik dengan faktor-faktor internal dalam negeri ataupun benturan dengan faktor-faktor eksternal yakni benturan dengan situasi internasional yang sedang berkembang. Meski dalam pelaksanaannya politik luar negeri Amerika Serikat sering berubah-ubah namun pada dasarnya Amerika Serikat memiliki prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

## **2. Konsep Power**

Power merupakan salah satu konsep yang sering digunakan dalam studi politik, terutama dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional tidak adanya institusi dan prosedur untuk menyelesaikan konflik

seperti dalam kebanyakan politik domestik telah membuat apa yang dinamakan konsep power (kekuasaan) menjadi lebih jelas daripada dalam tingkat domestik.

Menurut Arnold Wolfers, Power (kekuasaan) adalah kemampuan untuk menggerakkan "orang-orang" lain atau memaksa mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki dan tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki.<sup>4</sup> Di samping itu, ia memandang penting untuk membedakan antar kekuasaan dan pengaruh. Yang pertama berarti kemampuan untuk menggerakkan orang lain dengan ancaman ataupun perampasan hak-hak, sedangkan yang kedua berarti kemampuan untuk melakukan hal yang sama melalui janji-janji ataupun pemberian keuntungan.

Dalam membahas konsep Power, maka yang terbangun di alam pikiran kita adalah untuk apa sebenarnya Power dimiliki oleh suatu negara. Dengan kekuasaan yang dimilikinya sebuah negara dapat melakukan hegemoni terhadap kelas-kelas yang berada di bawahnya.

Kekuatan (Power) menurut Hans J. Morgenthau<sup>5</sup>, didefinisikan sebagai suatu hubungan antara dua aktor atau lebih dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B, lebih rinci dapat disebutkan sebagai berikut : Power, bisa terdiri apa saja yang menciptakan dan mempertahankan pengendalian seseorang atas orang lain meliputi semua hubungan sosial yang mendukung tujuan (pengendalian) itu,

---

<sup>4</sup> Harwanto Dahlan, *Teori-teori Hubungan Internasional*, Fisip UMY, Yogyakarta, 1996, hal. 106.

<sup>5</sup> Hans J. Morgenthau, *Politik Internasional*, Terjemahan A.M. fatwa (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1997) hal.45

mulai dari kekerasan fisik sampai hubungan psikologi yang paling halus yang di pakai oleh pikiran seseorang untuk mengendalikan pikiran orang lain.

Menurut Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe<sup>6</sup>, kekuatan (power) mempunyai tiga unsur utama, yaitu :

Unsur pertama, adalah kekuatan (power) yang bisa didefinisikan sebagai ancaman eksplisit, misalnya aktor A menggunakan alat-alat paksa seperti militer, ekonomi, dan lain-lain terhadap aktor B untuk mencapai tujuan-tujuan politik A. Unsur kedua, adalah pengaruh (influence) yang didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat persuasi, jenis kekuatan, oleh aktor A untuk menjaga atau mengubah perilaku aktor B dengan cara yang sesuai persepsi atau keinginan aktor A. Unsur ketiga, adalah paksaan (authority) yang didefinisikan sebagai kerelaan aktor B untuk memenuhi instruksi atau perintah yang dikeluarkan oleh aktor A.

Penggunaan suatu unsur power tidak selalu sama efektivitasnya atau sama fungsinya dalam semua situasi. Suatu Negara mungkin lemah dalam suatu situasi atau salah satu unsur tetapi kuat dalam situasi lain atau salah satu unsur lebih lainnya. Yang penting intangible dalam hubungan kekuasaan ini adalah kemauan (will) seseorang atau suatu Negara untuk menerapkan power yang dimilikinya. Suatu Negara yang kuat tidak menyadari kekuatannya, tidak mau atau tidak mampu menentukan bagaimana menggunakan kekuatan (power) itu, secara praktis Negara lemah (powerless).

---

<sup>6</sup> Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, *Introduction to International Relations: Power and*

perlu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang ada antara kekuasaan dan kepentingan dari para anggotanya<sup>7</sup>.

Amerika Serikat tidak menjadi negara yang paling kuat di dunia jika Amerika Serikat tidak menjadi pemimpin dan tidak mempunyai alat-alat kepemimpinan. Untuk menjaga kepemimpinannya, Amerika Serikat harus selalu siap mendukung diplomasinya dengan ancaman dengan kredibilitasnya yang tinggi. Saat ini, Amerika Serikat merupakan kekuatan yang paling kuat dan efektif di dunia.

Kekuatan militer tersebut merupakan sumber untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan rakyat AS, sesuai komitmen Amerika Serikat tentang keamanan. Amerika Serikat merupakan andalan PBB, terutama Dewan Keamanan untuk membantu PBB dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi melalui sumbangan militernya dengan cara pengiriman pasukan perdamaian dalam wadah PBB.

Keterlambatan atau penundaan kewajiban pembayaran kontribusi dari anggota Dewan Keamanan, akan sangat besar pengaruhnya pada persediaan dana untuk anggaran PBB. Sejak tahun 1980-an keadaan ini telah dimanfaatkan sebagai pengaruh oleh Amerika Serikat untuk memperjuangkan kepentingan negaranya melalui forum PBB dengan cara melakukan "withholding" (pemotongan pajak). Pembayaran sampai batas yang diperbolehkan (sesuai dengan pasal 19 piagam PBB), sehingga mengakibatkan

---

<sup>7</sup> Hasan Habib, "Peranan PBB di Bidang Pemeliharaan Perdamaian Pasca Perang Dingin: Reformasi, Rekonstruksi, dan Revitalisasi". Makalah yang disampaikan dalam seminar sehari: "Prespektif Keamanan dan Perdamaian Abad 21" Pusat studi Keamanan dan Perdamaian, Auditorium UGM 7 Desember 1995 Hal. 8

membela kepentingan atau memveto segala sesuatu yang merugikan kepentingan Israel, yang membuat PBB tidak dapat berbuat apa-apa sehingga terjadilah agresi Israel ke Lebanon, dimana Amerika Serikat (AS) merupakan penyumbang dana di PBB dan merupakan negara super power.

### **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori yang digunakan sebagai dasar analisa untuk diperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan dapat disimpulkan. Penekanannya pada usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif.<sup>8</sup>

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini, penulis mencoba mengamati permasalahan tersebut secara empirik dengan menerapkan studi pustaka dan berbagai sumber yang ada, seperti buku-buku referensi, surat kabar, majalah, jurnal, internet, dan beberapa data pendukung lainnya.

---

<sup>8</sup> Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999. pp. 55-6.

Kekuasaan pada umumnya diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang (Negara) lain. Ia merupakan faktor yang sangat penting dalam Hubungan Internasional. Kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer saja, tetapi juga faktor-faktor ekonomi, politik, teknologi, psikologi, juga sangat penting. Dalam suatu sistem internasional yang anarki, kekuasaan relatif dari setiap Negara menjadi penting dan bahkan menentukan. Negara pada dasarnya tidak bersedia kehilangan sebagian kekuasaannya, apalagi kalau sebagian kekuasaan yang hilang itu memberikan keuntungan-keuntungan baginya, kecuali jika ia menerima imbalan yang dinilainya layak atau lebih menguntungkan.

Dengan demikian, dalam memberikan dan memanfaatkan organisasi-organisasi internasional perlu diperhitungkan terutama, negara-negara besar biasanya sangat enggan menyerahkan keuntungan-keuntungan dari kekuasaan yang dimilikinya dan berusaha agar organisasi itu dibentuk dan disusun sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin berlanjutnya keadaan yang menguntungkannya itu. Sebaliknya Negara-negara yang relatif lemah dan kecil, yang secara otomatis berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan negara-negara besar, akan berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperbesar kekuasaan relatifnya dengan memanfaatkan organisasi internasionalnya itu. Dua tuntutan yang saling bertentangan itu memerlukan suatu akomodasi yang adil agar organisasi internasional itu bisa berfungsi secara efektif. Ini berarti bahwa pengaturan struktural dan prosedural, terutama mengenai cara pengambilan keputusan

PBB selalu kekurangan persediaan kas setiap tahunnya. Tidak tersedianya uang kas untuk pembiayaan kegiatan inilah yang dikenal dengan krisis keuangan PBB.

PBB pada dasarnya adalah ciptaan negara-negara besar yang muncul pada akhir Perang Dunia II. Oleh sebab itu, sejak semula hal ini merupakan kendala bagi PBB untuk benar-benar berperan sebagai aktor yang independen dalam politik internasional. Posisi negara-negara besar itu karena tanggung jawabnya yang besar atas perdamaian dunia dibanding dengan negara-negara lainnya, tercermin dalam veto mereka dalam Dewan Keamanan PBB. Ini berarti bahwa PBB hanya dapat berperan secara efektif untuk mencegah atau menumpas kekerasan dalam konflik-konflik yang secara tidak langsung melibatkan Negara-negara besar. Bahkan dalam hal-hal yang sedemikian pun PBB hanya bisa bertindak jika semua Negara besar sepakat, yaitu jika tidak satupun diantara mereka menggunakan hak vetonya.

#### **F. Hipotesis :**

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sementara bahwa adapun pengaruh hegemoni AS di PBB dalam kasus agresi Israel ke Lebanon adalah :

**Pengaruh hegemoni AS di PBB dalam kasus agresi Israel ke Lebanon adalah dapat dilihat dengan adanya hubungan antara AS dengan Israel dimana AS sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB yang memiliki hak veto, selalu menggunakan hak vetonya untuk**

## **L. Jangkauan Penelitian**

Penulis mengambil ruang lingkup penelitian mengenai masalah atau isu tentang hegemoni AS di PBB yang begitu kuat. Dan rentang waktu antara sebelum terjadinya agresi Israel ke Libanon dan sesudah terjadinya agresi Israel